

# DAFTAR ISI

Daftar isi .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Ikhtisar Eksekutif .....	iii
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
Maksud dan Tujuan.....	1
Tugas dan Fungsi Biro Kerjasama Luar Negeri.....	2
Keragaman SDM Biro Kerjasama Luar Negeri.....	3
Potensi dan Permasalahan.....	4
Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	5
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>7</b>
Rencana Strategis .....	7
Perjanjian Kinerja .....	10
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>13</b>
Capaian Kinerja Organisasi .....	13
Realisasi Anggaran .....	23
<b>BAB IV    PENUTUP .....</b>	<b>24</b>
Lampiran .....	

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Biro Kerjasama Luar Negeri tahun 2017 dapat tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Biro Kerjasama Luar Negeri atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2017. Penyusunan Laporan Kinerja Biro Kerjasama Luar Negeri tahun 2017 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Laporan Kinerja Biro Kerjasama Luar Negeri Badan POM 2017 menggambarkan sejumlah capaian kinerja yang telah dicapai tahun 2017 beserta analisisnya. Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja kedepan. Biro Kerjasama Luar Negeri berupaya secara terus menerus untuk mendukung peran Badan POM dalam menghadapi tantangan global di bidang pengawasan obat dan makanan. Upaya tersebut ditempuh melalui pencapaian sasaran “peningkatan kerjasama lintas sektor yang efektif antara instansi di dalam dan mitra luar negeri”. Berbagai program/kegiatan yang dilakukan yang mengarah pada sasaran tersebut, tercermin dalam Rencana Strategis Biro Kerjasama Luar Negeri tahun 2015-2019 yang implementasinya pada tahun 2017 dan dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) 2017.

Kami berharap dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Biro Kerjasama Luar negeri tahun 2017, akan dapat diperoleh manfaat dan menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja selama satu tahun ke depan dengan diiringi semangat untuk terus meningkatkan dan mendukung kinerja Badan POM seutuhnya. Sehingga ke depannya Biro Kerjasama Luar Negeri dapat melaksanakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi dalam pelaksanaannya.

Jakarta,            Februari 2018  
Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri

  
**Diana ES Sutikno.**

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Biro Kerjasama Luar Negeri merupakan unit penunjang BPOM, yang untuk dapat meningkatkan hubungan dan kerjasama luar negeri Badan POM dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Badan POM dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Biro Kerjasama Luar Negeri juga dituntut untuk dapat melakukan kajian-kajian terhadap potensi kerjasama luar negeri dengan negara-negara mitra maupun kerjasama dalam lingkup yang lebih besar seperti regional dan multilateral. Sebagai upaya mendukung peningkatan hubungan dan kerjasama luar negeri tersebut Biro Kerjasama Luar Negeri melakukan peninjauan hubungan bilateral dengan instansi terkait di negara mitra, penyusunan kertas posisi/dokumen posisi dan partisipasi dalam forum dan kerjasama internasional, persiapan penyelenggaraan pertemuan internasional, koordinasi dengan instansi lintas sektor/interkementerian, penyiapan materi (kertas posisi) sampai dengan fasilitasi perjalanan dinas luar negeri berupa pelayanan administrasi dokumen perizinan perjalanan dinas luar negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Kerjasama Luar Negeri berlandaskan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015-2019, maupun Rencana Strategis (Renstra) BPOM Tahun 2015-2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Kerjasama Luar Negeri Tahun 2017, menyajikan capaian kinerja Biro Kerjasama Luar Negeri Tahun 2017. Capaian kinerja tercermin dalam capaian indikator kinerja utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Capaian IKU Biro Kerjasama Luar Negeri mencapai 100 % sehingga masuk ke dalam kategori **BAIK**. Capaian yang masih cukup (87,30%) adalah sistem akuntabilitas di Biro Kerjasama Luar Negeri ditandai dengan pencapaian nilai SAKIP sebesar 71,74 dengan kategori Baik dari target nilai SAKIP Sangat Baik (A) dengan nilai minimal 80. Walaupun masih dalam kategori yang sama, nilai SAKIP Biro Kerjasama Luar Negeri menunjukkan peningkatan dari tahun 2015 mendapat nilai 62,57; tahun 2016 mendapat nilai 69,84 dan tahun 2017 mendapat nilai 71,74.

Meskipun demikian, pencapaian target indikator kinerja Biro Kerjasama Luar Negeri memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan kerjasama luar negeri sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif unit kerja teknis terkait.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Biro Kerjasama Luar Negeri bagi peningkatan kinerja dimasa datang antara lain adalah:

1. Menyusun sistem informasi hubungan dan kerjasama luar negeri Badan POM untuk membangun *instution knowledge* sehingga pejabat yang berkepentingan dapat memperoleh informasi data kerjasama yang komprehensif dan terkini. Hal ini penting dalam menyusun posisi kerjasama dan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan Badan POM khususnya dalam membangun kemitraan dan jejaring kerjasama dengan stakeholder terkait.
2. Meningkatkan pengelolaan *Human Capital Management* (HCM) di Biro KSLN dalam membuat perencanaan dengan melibatkan semua SDM yang ada
3. Meningkatkan implementasi Reformasi Birokrasi (RB), Quality Management System (QMS), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)  
Untuk meningkatkan implementasi RB, QMS dan SPIP diperlukan beberapa komponen seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kesadaran pegawai terhadap pelaksanaan ketiga hal tersebut. Antara lain meningkatkan komitmen dalam melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan dan meningkatkan kompetensi pengelolaan anggaran.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Tahun 2017 merupakan tahun ke tiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) melaksanakan 5 (lima) dari 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan Nawacita terutama agenda ke-5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dengan menunjang Program Indonesia Sehat melalui Pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai acuan untuk melaksanakan program prioritas tersebut, Badan POM telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) periode 2015-2019 yang dijabarkan lebih lanjut pada Renstra Eselon I dan Renstra unit kerja. Renstra Biro Kerjasama Luar Negeri telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Nomor HK.04.2.21.05.15.0614 tanggal 5 Mei 2015. Dokumen renstra tersebut memuat indikator kinerja dan target yang diurai per-tahun.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan renstra, Biro Kerjasama Luar Negeri dituntut menerapkan akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja. Laporan Kinerja memuat penjelasan atas pencapaian setiap sasaran strategis yang ditetapkan dalam renstra dan perjanjian kinerja termasuk aspek keuangan yang mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang digunakan dengan hasil dan manfaat yang diperoleh. Laporan kinerja Biro Kerjasama Luar Negeri Tahun 2017 dapat dimanfaatkan untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, dan penyempurnaan kebijakan yang diperlukan. Laporan Kinerja Biro Kerjasama Luar Negeri Tahun 2017 juga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kemajuan kinerja Biro Kerjasama Luar Negeri

### **1.1. Maksud dan Tujuan**

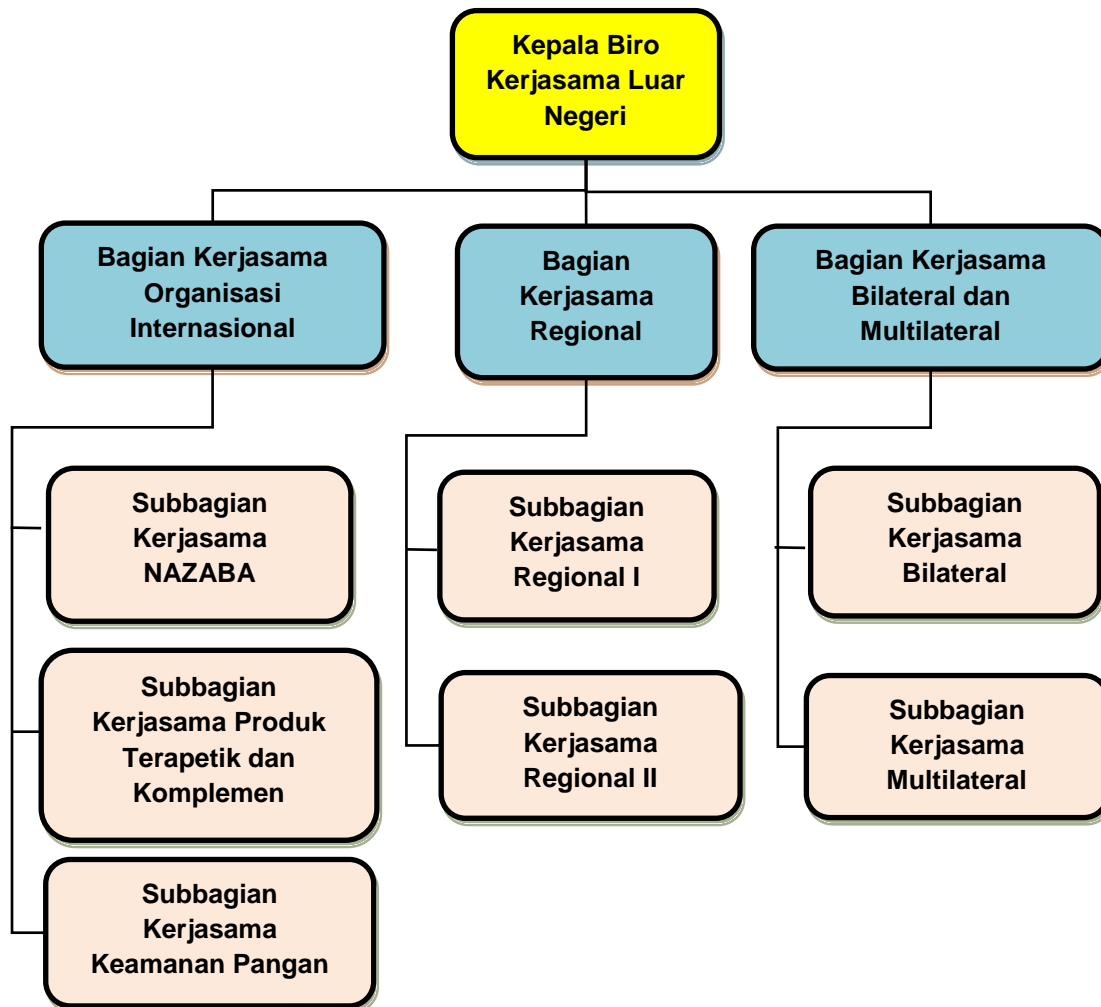
Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2017 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Biro Kerjasama Luar Negeri selama tahun 2017. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat

menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

### 1.2. Tugas dan Fungsi Biro Kerjasama Luar Negeri, Badan POM.

Badan POM berdiri pada tahun 2001 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013. Biro Kerjasama Luar Negeri sebagai salah satu unit penunjang di Badan POM dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 02001/SK/KBPOM tanggal 26 Pebruari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004.



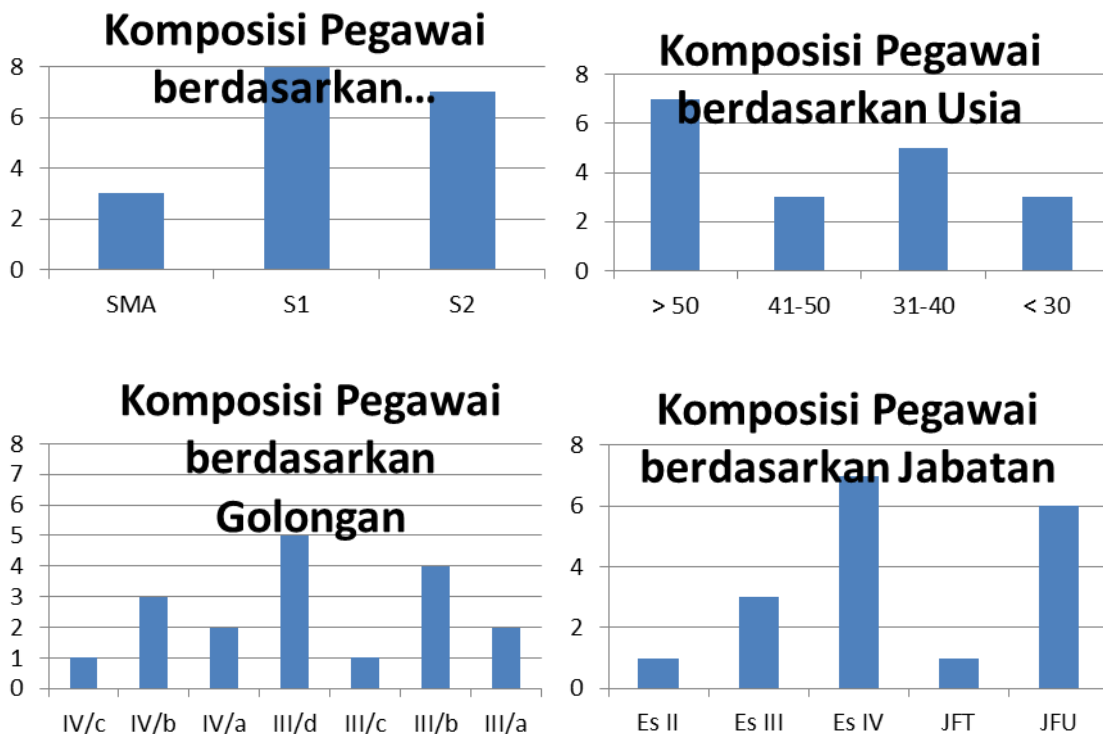
Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Kerjasama Luar Negeri

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Kerjasama Luar Negeri, dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi. Biro Kerjasama Luar Negeri berada di bawah Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan kerjasama internasional yang berkaitan dengan tugas Badan POM. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan kerjasama bilateral dan multilateral;
- b. Pelaksanaan kegiatan kerjasama regional;
- c. Pelaksanaan kegiatan kerjasama organisasi internasional

### 1.3. Keragaman SDM Biro Kerjasama Luar Negeri

Data per 31 Desember 2017, jumlah pegawai Biro Kerjasama Luar Negeri Badan POM seluruhnya adalah 24 (dua puluh empat) orang, jumlah tersebut terdiri dari 16 (enam belas) orang ASN dan staf pramubakti yang berjumlah 8 (delapan) orang. Jabatan struktural di Biro Kerjasama Luar Negeri terdiri dari 1 (satu) Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri, 3 (tiga) Kepala Bagian, 7 (tujuh) Kepala Sub Bagian. Gambaran SDM Biro Kerjasama Luar Negeri berdasarkan pendidikan, usia, golongan dan jabatan dapat digambarkan seperti Gambar 2.



Gambar 2. Gambaran SDM Biro Kerjasama Luar Negeri berdasarkan Pendidikan, Usia, Golongan dan Jabatan

#### 1.4. Potensi dan Permasalahan

Globalisasi merupakan perubahan interaksi manusia secara luas yang mencakup banyak bidang dan saling terkait. Proses ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi, informasi, dan transportasi yang sangat cepat. Dampak tersebut mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional, khususnya kerjasama di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas (*Free Trade Area/FTA*) baik kerjasama bilateral, regional, maupun multilateral. FTA membuka peluang perdagangan obat dan makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau sehingga terdapat risiko beredarnya obat ilegal maupun pangan mengandung bahan berbahaya. Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan ekonomi dan kesehatan.

Dampak globalisasi pada pembangunan ekonomi, dapat membuka peluang yang memungkinkan sejumlah produk obat dan makanan Indonesia lebih mudah memasuki pasaran domestik negara-negara yang bergabung dalam perjanjian FTA. Hal ini juga membuka peluang bagi produk obat dan makanan negara anggota FTA untuk masuk ke Indonesia. Masuknya produk perdagangan bebas tersebut, merupakan persoalan krusial yang perlu segera diantisipasi. Realitas menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah menjadi pasar bagi produk obat dan makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Perdagangan bebas juga membawa dampak pada penurunan derajat kesehatan yang dipicu dengan oleh perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran akan kesehatan. Untuk itu, masyarakat perlu proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi obat dan makanan tersebut.

Badan POM menyadari dalam pengawasan obat dan makanan tidak dapat menjadi *single player*. Untuk itu Badan POM mengembangkan kerjasama dengan stakeholder baik dalam negeri maupun luar negeri. Badan POM telah berperan aktif dalam forum bilateral (melakukan kunjungan kerja ke 13 (tiga belas) negara dan 17 (tujuh belas) institusi), regional (ASEAN, APEC), multilateral dan organisasi internasional (WTO, WHO, Codex Alimentarius Commission, FAO, Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Co-operation Scheme (PIC/S), International Crime Police Organization (Interpol), Commission Narcotics Nation (CND) dll). Jejaring kerjasama ini perlu penguatan karena

karena belum semuanya berjalan efektif. Tantangan kedepan, Badan POM harus membuat terobosan untuk memperkuat kemitraan dengan stakeholder terkait dalam pengawasan obat dan makanan.

Berkaitan dengan tugas-tugas yang secara langsung ditangani oleh Biro Kerjasama Luar Negeri, terdapat potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan koordinasi kerja sama luar negeri antara lain:

- a. Hubungan dan kerja sama bilateral, beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan European Union mengusulkan konsep *free trade agreement* dalam bentuk *Framework Agreement Trade and Investment Council (TIC)* dan *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)*.
- b. Hubungan dan kerja sama regional, mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dan perjanjian *Free Trade Area ASEAN+1 FTA (AC-FTA, AJCEP, AANZ-FTA, AI-FTA, AK-FTA)*, serta perintisan perluasan kerjasama ASEAN dengan 6 mitra *partner* ASEAN (China, Jepang, Korea, Australia, New Zealand dan India) dalam forum RCEP menjadi satu forum tunggal yang akan berisi 16 negara.
- c. Hubungan dan kerja sama multilateral/organisasi internasional, konsep *free trade* dalam WTO.

Konsep kawasan bebas perdagangan yang diusulkan oleh negara-negara tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara masing-masing dan juga kawasan regional terkait. Hal ini membuka peluang peningkatan nilai ekonomi sektor barang dan jasa serta memungkinkan sejumlah produk obat dan makanan Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestik negara-negara yang tergabung dalam perjanjian pasar bilateral, regional maupun multilateral tersebut begitu juga sebaliknya. Untuk itu, Badan POM di masa yang akan datang tidak hanya menghadapi tantangan dalam pengawasan obat dan makanan di kawasan Indonesia, namun juga mempunyai tantangan dalam meningkatkan daya saing industri farmasi, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan makanan dalam negeri agar mampu bersaing di pasar Indonesia maupun pasar internasional.

#### 1.5. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Biro Kerjasama Luar Negeri Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- 1) Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.
- 2) Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini dibagi per subbab yang berisi perencanaan strategis Biro Kerjasama Luar Negeri 2015-2019 dan penetapan kinerja tahun 2017.
- 3) Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini dibagi per subbab yang berisi hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan Laporan Kinerja tahun 2017.
- 4) Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja dan rekomendasi perbaikan kedepan untuk meningkatkan kinerja.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### **RENCANA STRATEGIS**

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 memberikan amanat bahwa pembangunan kesehatan dan gizi bangsa Indonesia ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan baik pada tingkat individu, keluarga maupun masyarakat. Salah satu upaya dalam pembangunan kesehatan dan gizi tersebut, perlu dilakukan peningkatan pengawasan obat dan makanan. Hal tersebut dituangkan dalam Visi dan Misi yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan POM cq. Biro Kerjasama Luar Negeri. Visi dan Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan operasional berupa tujuan strategis (*strategic goals*) Badan POM. Rencana pencapaian tujuan strategis Badan POM lebih lanjut dituangkan dalam rencana strategis (Renstra).

VISI	MISI	TUJUAN
<ul style="list-style-type: none"><li>• Obat dan Makanan Aman, Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat;</li><li>• Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan;</li><li>• Meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan POM</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan jaminan produk Obat dan Makanan aman</li><li>• Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal, dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi</li></ul>

Melalui Peraturan Kepala Badan POM Nomor 2 Tahun 2015, Badan POM telah menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan Badan POM Tahun 2015-2019 yang merupakan acuan/pedoman bagi setiap unit organisasi eselon I, satuan kerja dan unit organisasi eselon II di lingkungan Badan POM dalam menyusun Renstra Tahun 2015-2019, dokumen perencanaan tahunan dan sebagai dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan POM. Hal tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.04.2.21.04.15.1986 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan POM Tahun 2015-2019.

Untuk mendukung tugas utama serta fungsi Badan POM, dan sesuai dengan amanat Peraturan Kepala Badan POM Nomor 2 Tahun 2015 dan Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.04.2.21.04.15.1986 Tahun 2015 tersebut, Biro Kerjasama Luar Negeri menyusun rencana strategis dan program kegiatan yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Nomor HK.04.2.21.05.15.0614 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Biro Kerjasama Luar Negeri Tahun 2015-2019, Keputusan Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Nomor HK.04.2.21.05.15.0615 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Biro Kerjasama Luar Negeri Tahun 2015-2019, Keputusan Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Nomor HK.04.2.21.12.15.1431 Tahun 2015 tentang Penetapan Rencana Kinerja Tahunan Biro Kerjasama Luar Negeri Badan POM Tahun 2016, dan Keputusan Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Nomor HK.04.2.21.12.16.008 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Biro Kerjasama Luar Negeri Badan POM Tahun 2016.

Biro Kerjasama Luar Negeri mempunyai peran strategis dalam mendukung tugas utama Sekretariat Utama pada **“Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya”** dengan sasaran program **“Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Kerjasama”**. Untuk mencapai sasaran program tersebut, Biro Kerjasama Luar Negeri menyusun sasaran kegiatan yaitu **“Terselenggaranya koordinasi kerjasama dan kemitraan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan”**, dengan indikator kinerja utama yaitu **jumlah pengembangan kerjasama dan atau kerjasama internasional di bidang obat dan makanan.**

Dengan mempertimbangkan aspek strategis, potensi dan permasalahan yang dihadapi serta sasaran strategis, Biro Kerjasama Luar Negeri telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai pada periode tahun 2015-2019 seperti pada Tabel.1.

**Tabel 1. Target Kinerja Biro Kerjasama Luar Negeri Tahun 2015-2019**

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target (dokumen)				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya koordinasi kerjasama dan kemitraan di bidang pengawasan obat dan makanan	Jumlah pengembangan kerjasama dan atau kerjasama internasional di bidang obat dan makanan	25	28	31	34	37
Kerangka Pendanaan (Rp, Milyar)		5,6	6,0	7,0	7,0	8,0

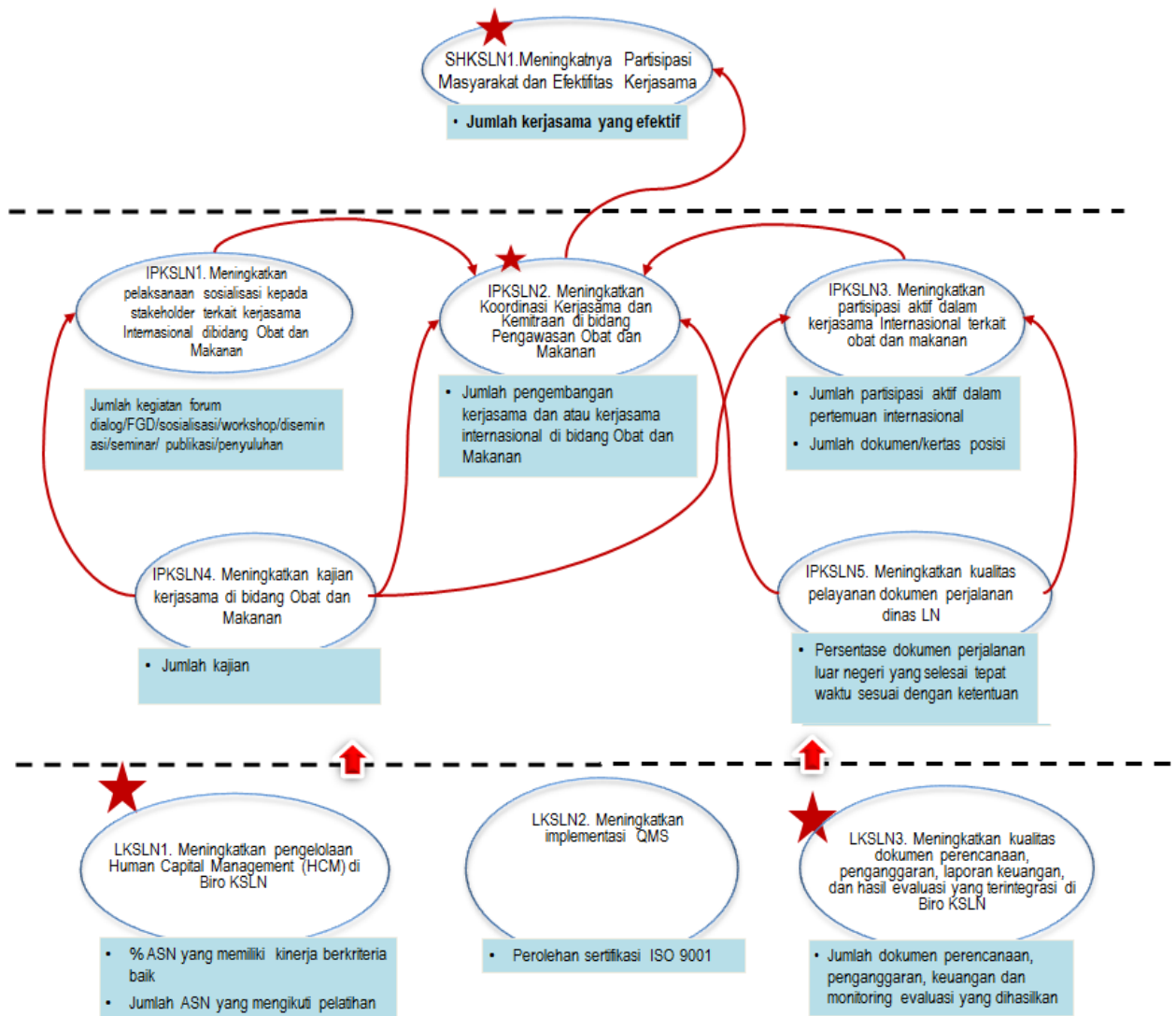
Biro Kerjasama Luar Negeri sebagai *focal point* dalam menyelenggarakan koordinasi kerjasama dan kemitraan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan, dituntut untuk dapat meningkatkan hubungan dan kerjasama luar negeri Badan POM dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Badan POM. Untuk itu, Biro Kerjasama Luar Negeri menetapkan arah kebijakan dan program kegiatan yang mendukung Sasaran Kegiatan (SK), Sasaran Program (SP) dan pada akhirnya menyumbang pencapaian Sasaran Strategis (SS) Sekretariat Utama yang digambarkan seperti pada Log Frame pada Gambar 3.



Gambar 3. *Log Frame* Fungsi-Fungsi Generik Biro Kerjasama Luar Negeri

Log Frame tersebut dituangkan pada Peta Strategi Biro Kerjasama Luar Negeri seperti pada Gambar 4. yang mencakup Sasaran Mutu ditingkat stakeholder (outcome), proses dan kapabilitas.

## PETA STRATEGI BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI 2015-2019



Gambar 4. Peta Strategi Biro Kerjasama Luar Negeri

### **PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan perjanjian kinerja antara lain adalah sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, menciptakan

tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi aparatur, sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan *punishment* atau sanksi.

**Tabel 2. Perjanjian Kinerja Biro Kerjasama Luar Negeri Tahun 2017**

Sasaran strategis/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Anggaran
Meningkatnya efektivitas kerjasama luar negeri Badan POM	Jumlah Kerjasama yang Efektif	31 kerjasama efektif	
Meningkatnya koordinasi kerjasama dan kemitraan di bidang pengawasan obat dan makanan	Jumlah pengembangan kerjasama dan atau kerjasama internasional di bidang obat dan makanan	31 dokumen kerjasama	Rp.6.251.665.000

Perjanjian kinerja Biro Kerjasama Luar Negeri Tahun 2017, merupakan perjanjian Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri dengan Sekretaris Utama (Lampiran 1) dengan indikator utama adalah Dokumen pengembangan kerjasama dan/atau kerjasama dibidang obat dan makanan. Sesuai dengan dokumen rencana kerja pemerintah (RKP), definisi operasional untuk indikator utama adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan kerjasama luar negeri meliputi penjajagan (membuat telaah/kajian) kerjasama, penyusunan kesepakatan kerjasama, pelaksanaan kerjasama, seperti:
  - Kerjasama bilateral : Indonesia- Negara mitra, Badan POM - *Food and Drug Administration* (FDA) Negara lain, *Japan International Cooperation Agency* (JICA), *Korea International Cooperation Agency* (KOICA), *Ministry of Food Drug Safety* (MFDS), *Phamaceuticals and Medical Devices Agency* (PMDA), dll
  - Kerjasama regional : ASEAN, Regional Cooperation Economic Partnership (RCEP), ASEAN+1, ASEAN Sub Regional, APEC, dll
  - Kerjasama multilateral/organisasi internasional: WHO, WTO, *World Intellectual Property Organization* (WIPO), dan lembaga internasional lainnya *International Narcotic Control Board* (INCB), *FAO*, *Organization of The Islamic Conference* (OIC), dll
- b. Kerja sama adalah kesepakatan internasional yang dituangkan dalam dokumen resmi (Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman, Letter of Agreement,

Arrangement, Memorandum Saling Pengertian, Record of Discussion) yang ditandatangani oleh Kepala Badan POM atau atas nama Kepala Badan POM

Untuk mewujudkan kinerja tersebut dan berdasarkan peta strategi Biro Kerjasama Luar Negeri, dirancang kegiatan seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Program Kegiatan Biro Kerjasama Luar Negeri Tahun 2017

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan
Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi kepada stakeholder terkait kerjasama Internasional dibidang Obat dan Makanan	Jumlah kegiatan sosialisasi /publikasi/workshop	15 sosialisasi /publikasi/workshop	Notifikasi Regulasi Teknis Obat dan Makanan dalam rangka Agreement WTO
			Drug and Food Control Newsletter
			Workshop isu-isu kerjasama regional
			Sosialisasi Penerapan Agreement TBT-WTO
			Sosialisasi Isu-Isu Kerjasama Organisasi Internasional
			Workshop ASEAN
			Workshop Badan POM – Negara Mitra
Meningkatkan partisipasi aktif dalam kerjasama Internasional terkait obat dan makanan	Jumlah dokumen / kertas posisi	28 posisi	Perumusan Kertas/Dokumen Posisi dengan Negara Mitra
			Perumusan Kertas/Dokumen Posisi Kerjasama Regional
	Jumlah partisipasi aktif dalam pertemuan internasional	23 Pertemuan	Perumusan Kertas/Dokumen Posisi Kerjasama Organisasi Internasional
			Dukungan Penyelenggaraan Pertemuan Internasional (WHO Global Monitoring and Surveillance SSFFC)
			Keikutsertaan dalam Pertemuan Interkementerian dan Pertemuan Internasional di Dalam Negeri
Meningkatkan kajian kerjasama di bidang Obat dan Makanan	Jumlah kajian	7 kajian	Keikutsertaan dalam Pertemuan Interkementerian dan Pertemuan Internasional di Dalam Negeri
			Kajian Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri
Meningkatkan kualitas pelayanan dokumen perjalanan dinas LN	Persentase dok perjalanan luar negeri yang selesai tepat waktu	95 %	Perencanaan Hubungan Kerjasama Luar Negeri
Meningkatkan pengelolaan Human Capital Management (HCM) di Biro KSLN	% ASN yang memiliki kinerja berkriteria baik	80 %	Operasional Biro Kerjasama Luar Negeri Alat Pengolah Data Biro Kerjasama Kerjasama Luar Negeri Peralatan Perkantoran Biro Kerjasama Luar Negeri
	% ASN yang mengikuti pelatihan	100 %	Peningkatan Kompetensi Pegawai Biro Kerjasama Luar Negeri
Implementasi QMS di Biro KSLN	Perolehan sertifikasi ISO 9001	1 Sertifikat	Penerapan RB/QMS/SPIP/LO di Biro KSLN dalam rangka Hubungan Kerjasama Luar Negeri
Meningkatkan akuntabilitas Biro KSLN	Nilai SAKIP dari BPOM	A	Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri

## BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Biro Kerjasama Luar Negeri dalam melaksanakan program kegiatan sudah cukup baik, ditandai dengan *score unit* pada sistem *e-performance* mencapai 3,94. Rata-rata capaian kegiatan Biro Kerjasama Luar Negeri pada level stakeholder dan proses dapat memenuhi target yang telah ditetapkan ditandai dengan score 4 (Baik), sedangkan capaian sistem akuntabilitas masih cukup dengan nilai *score* 3 karena belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Secara rinci, capaian kinerja Biro Kerjasama Luar Negeri per-kegiatan seperti pada Tabel 5

Tabel 5. Capaian Kinerja Biro Kerjasama Luar Negeri Tahun 2017

Sasaran strategis/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Capaian (%)
Meningkatnya efektivitas kerjasama luar negeri Badan POM	Jumlah Kerjasama yang Efektif	28 kerjasama efektif	28	100%
Meningkatnya koordinasi kerjasama dan kemitraan di bidang pengawasan obat dan makanan	Jumlah pengembangan kerjasama dan atau kerjasama internasional di bidang obat dan makanan	28 dokumen kerjasama	28	100%
Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi kepada stakeholder terkait kerjasama Internasional dibidang Obat dan Makanan	Jumlah kegiatan sosialisasi /publikasi/workshop	15 sosialisasi /publikasi/ workshop	15	100%
Meningkatkan partisipasi aktif dalam kerjasama Internasional terkait obat dan makanan	Jumlah dokumen / kertas posisi	28 posisi	28	100%
	Jumlah partisipasi aktif dalam pertemuan internasional	23 pertemuan	23	100%
Meningkatkan kajian kerjasama di bidang Obat dan Makanan	Jumlah kajian	7 kajian	7	100%
Meningkatkan kualitas pelayanan dokumen perjalanan dinas LN	Persentase dok perjalanan luar negeri yang selesai tepat waktu	95 %	95,03%	100%
Meningkatkan pengelolaan Human Capital Management (HCM) di Biro KSLN	% ASN yang memiliki kinerja berkriteria baik	80 %	100%	100%
	% ASN yang mengikuti pelatihan	100 %	100%	100%
Implementasi QMS di Biro KSLN	Perolehan sertifikasi ISO 9001	1 Sertifikat	1 sertifikat	100%
Meningkatkan akuntabilitas Biro KSLN	Nilai SAKIP dari BPOM	80	71,74	89,67%

Untuk mengukur capaian kinerja atau capaian output organisasi digunakan nilai persentase dari realisasi capaian dibandingkan dengan rencana atau target capaian pada tahun 2017 sebagaimana rumus dibawah ini:

$$\% \text{ Capaian Output} = \frac{\text{Realisasi Capaian}}{\text{Rencana Capaian}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk mengetahui baik atau buruknya pencapaian output suatu organisasi dapat mengacu pada kriteria pencapaian indikator sebagai berikut:



Capaian IKU Biro Kerjasama Luar Negeri mencapai 100 % sehingga masuk ke dalam kategori **BAIK**. Capaian yang masih cukup (87,30%) adalah sistem akuntabilitas di Biro Kerjasama Luar Negeri ditandai dengan pencapaian nilai SAKIP sebesar 71,74 dengan kategori BB dari target nilai SAKIP Sangat Baik (A) dengan nilai minimal 80. Walaupun masih dalam kategori yang sama, nilai SAKIP Biro Kerjasama Luar Negeri menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 yang mendapat nilai 69,84.

Dalam rangka perbaikan sistem akuntabilitas dan meningkatkan efektivitas organisasi, Biro Kerjasama Luar Negeri melakukan monitoring kegiatan dan evaluasi internal setiap triwulan. Dari hasil evaluasi, kelemahan yang dirasakan dari perencanaan program tahun 2017 adalah komponen kegiatan disusun berdasarkan kesamaan kegiatan yang terdapat pada seluruh bagian dan sub bagian. Sedangkan dalam *e-performance*, penilaian berdasarkan komponen kegiatan yang mencerminkan kinerja suatu unit (bagian/sub bagian). Sehingga ketika monitoring kegiatan, sulit untuk mengidentifikasi unit yang belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

Untuk perbaikan sistem akuntabilitas agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, maka perencanaan kegiatan Tahun 2017, komponen kegiatan disusun berdasarkan unit (bagian). Selain itu, tahun 2017 juga direncanakan untuk menyusun sistem informasi hubungan dan kerjasama luar negeri Badan POM untuk menyajikan data kerjasama luar negeri Badan POM yang komprehensif, akurat dan terkini. Sistem informasi ini

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan stakeholder internal maupun eksternal seperti penyusunan MoU atau posisi kerjasama luar negeri dan sebagai bahan pertimbangan

penentuan arah kebijakan Badan POM khususnya dalam membangun kemitraan dan jejaring kerjasama.

### **Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Biro Kerjasama Luar Negeri, target jumlah pengembangan kerja sama dan atau kerja sama internasional di bidang obat dan makanan tahun 2017 adalah 31 dokumen. Pengukuran capaian 31 dokumen pengembangan kerjasama dan atau kerjasama internasional di bidang obat dan makanan merupakan gabungan dari dokumen posisi sebanyak 28 dokumen dan partisipasi aktif dalam pertemuan internasional 23 pertemuan sidang internasional (Tabel 6). Pertemuan Internasional dapat dilaksanakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jumlah tersebut memberikan gambaran adanya *overlap* kinerja bahwa Biro Kerjasama Luar Negeri dapat ikut berpartisipasi aktif dan atau hanya memberikan masukan posisi terhadap forum kerjasama luar negeri tersebut.

Kegiatan penyusunan kajian ditujukan untuk memberikan bahan pertimbangan dan dukungan dalam penyusunan dokumen/kertas posisi kerjasama. Kegiatan sosialisasi ditujukan untuk pertukaran informasi dan meningkatkan pemahaman unit kerja dalam implementasi dan tindak lanjut kerjasama luar negeri. Dukungan pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri ditujukan sebagai dukungan pelaksanaan partisipasi aktif pertemuan dan kerjasama luar negeri.

Tabel 6. Capaian dokumen pengembangan kerja sama dan atau kerja sama internasional di bidang obat dan makanan tahun 2017

No	Dokumen pengembangan kerjasama/kerjasama	Dokumen Posisi/Kerjasama	Partisipasi Aktif
1	MoU Badan POM dengan <i>National Center for Expertise of Medicines, Medical Devices and Equipment</i> (NCEMMDME)-Kazakhstan	MoU Badan POM dengan NCEMMDME-Kazakhstan	MoU Badan POM dengan NCEMMDME-Kazakhstan
2	MoU Badan POM dengan <i>Service of Ukraine on Medicines and Drugs Control</i> (SSUMDC)-Ukraina	MoU Badan POM dengan SSUMDC-Ukraina	MoU Badan POM dengan SSUMDC-Ukraina
3	Kerjasama JICA	Kerjasama JICA	
4	Kerjasama Maroko	Kerjasama Maroko	Kerjasama Maroko
5	Kerjasama Timor leste	Kerjasama Timor Leste	Kerjasama Rusia
6	Kerjasama Korea	Kerjasama Korea	Kerjasama Korea
7	Kerjasama Amerika	Kerjasama Amerika	Kerjasama Amerika
8	NZ Australia	NZ Australia	Denmark
9	IA-CEPA	IA-CEPA	IA-CEPA
10	Timor Leste	Timor Leste	
11	Kerjasama Selatan-Selatan (KSS)	KSS	
12	<i>Senior Official Meeting on Health Development</i> (SOMHD) Cluster 4	SOMHD Cluster 4	
13	<i>Asia-Pacific Economic Cooperation</i> (APEC)	APEC	APEC
14	<i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i> (RCEP)	RCEP	RCEP
15	ACCSQ ASEAN Cosmetic Committee (ACC)	ACC	ACC
16	ACCSQ <i>Traditional Medicines and Health Supplement</i> (TMHS) Product WG	ACCSQ TMHS Product WG	ACCSQ TMHS Product WG
17	ACCSQ <i>Pharmaceutical</i> PWG (PPWG)	ACCSQ-TMHS Product WG	ACCSQ-TMHS Product WG
18	ACCSQ <i>Prepared Food Stuff</i> PWG (PFPWG)	ACCSQ -PFPWG	ACCSQ -PFPWG
19	ASEAN-Hongkong FTA	ASEAN-Hongkong FTA	ASEAN-Hongkong FTA
20	ASEAN - CHINA FTA	ASEAN - CHINA FTA	
21	ASEAN-Australia-New Zealand (ANZ FTA)	ANZ FTA	ANZ FTA
22	Senior Official Meeting (SOM)		SOM
23	<i>Technical Barrier Trade</i> (TBT)-WTO		TBT-WTO
24	Sanitary and Phytosanitary (SPS) WTO		SPS-WTO
25	TRIPS-WTO	TRIPS-WTO	TRIPS-WTO
26	World Health Organization: <i>World Health Assembly (WHA), Member States Mechanism on Substandard/Spurious/Falsely Labeled/Falsified/Counterfeit Medical Products</i> (MSM on SSFFC)	WHA MSM SSFFC	WHA, MSM SSFFC, UNGASS
27	<i>The Indian Ocean Rim Association</i> (IORA),	IORA	
28	Codex	Codex	Codex

Hingga akhir tahun 2017, Biro Kerjasama Luar Negeri telah melaksanakan 5 (lima) kegiatan yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) sub kegiatan. Kegiatan tersebut mendukung pencapaian sasaran strategis dan semua kegiatan terealisasi 100%. Kegiatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Bilateral dan Multilateral, yang terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan yaitu Penjajakan Kerjasama dengan Mitra di Luar negeri, Penyusunan Kajian Kerjasama Bilateral dan Multilateral, Penyusunan Posisi Badan POM dalam Kerjasama Bilateral dan Multilateral, Keikutsertaan dalam Pertemuan Interkementerian dan Pertemuan Bilateral Multilateral dengan Mitra di Dalam dan Luar Negeri, Pelaksanaan Kerjasama Selatan – Selatan dan Triangular, Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-Isu Kerjasama Bilateral dan Multilateral.

Dalam kegiatan tersebut telah tersusun 12 (dua belas) *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama serta 11 (sebelas) dokumen kerjasama bilateral dan multilateral. MoU dan Perjanjian Kerja Sama yang berhasil ditandatangani pada tahun 2017 sebanyak 6 (enam) dokumen yaitu Kerjasama antara Badan POM dengan *World Health Organization (WHO)*, *Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires* Maroko, USP, *Jordan Food and Drug Administration*, *Iran Food and Drug Administration*, *University of Georgia*. Dokumen posisi kerjasama bilateral dan multilateral lainnya meliputi kerjasama dengan Jepang (JICA), Maroko, Timor Leste, Rusia, Korea, Amerika, TRIPS-WTO, *Trade Facilitation (TF) WTO* dan Kerjasama Selatan-Selatan (KSS).

2. Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Regional terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan yaitu Penyusunan Posisi Badan POM dalam Kerjasama Regional, Penyusunan Kajian Kerjasama Regional, Keikutsertaan dalam Pertemuan Interkementerian dan Pertemuan Regional di Dalam dan Luar Negeri, Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-Isu Kerjasama Regional, *Drug and Food Control Newsletter*.

Perumusan Kertas/ Dokumen Posisi Kerjasama Regional meliputi Dokumen Posisi Kerjasama *Senior Official Meeting on Health Development (SOMHD) Cluster 4, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)*, *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*, *ACCSQ ASEAN Cosmetic Committee (ACC)*, *ACCSQ Traditional Medicines and Health Supplement (TMHS) Product WG*, *ACCSQ Pharmaceutical PWG (PPWG)*, *ACCSQ Prepared Food Stuff PWG (PFPWG)*, ASEAN-Hongkong FTA, ASEAN - CHINA FTA, ASEAN - Jepang (AJCEP), dan ASEAN-Australia-New Zealand (ANZ FTA).

Penerbitan *Drug and Food Control Newsletter* merupakan salah satu sarana sosialisasi dan penyebaran informasi yang akurat dan terkini terkait isu terkini yang terkait obat dan makanan seperti isu-isu dan program terbaru dari unit-unit teknis di Badan POM,

partisipasi Badan POM dalam pertemuan internasional, informasi kegiatan yang akan diselenggarakan di Badan POM, pergantian pejabat, *press release*, *public warning*, profil unit kerja, dan profil pejabat. Pada tahun 2017, Biro Kerjasama Luar Negeri telah menerbitkan *Drug and Food Control Newsletter* sebanyak 3 edisi kali sebanyak 1500 eksemplar per edisi (tercapai 100%) dan didistribusikan kepada mitra kerja Badan POM yaitu perwakilan RI di luar negeri, perwakilan asing di Indonesia, organisasi internasional, instansi pemerintah RI, universitas, *National Regulatory Authority (NRA)* negara lain dan lingkungan Badan POM pusat dan daerah. Kendala yang dihadapi adalah terlambatnya masukan artikel dari unit kerja, beban kerja yang tinggi sehingga penulis artikel atau editor tidak dapat hadir pada saat pembahasan artikel, membuat terlambatnya penerbitan dan pengiriman *newsletter* tersebut. Terkait dengan hal ini, Biro Kerjasama Luar Negeri telah mengevaluasi kegiatan ini dan dihasilkan rekomendasi untuk membuat jadwal atau perencanaan dan meningkatkan komitmen penanggung jawab kegiatan untuk melaksanakan pembahasan sesuai dengan perencanaan.

3. Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Organisasi Internasional, yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yaitu Penyusunan Kajian Kerjasama Organisasi Internasional, Penyusunan Posisi Badan POM dalam Kerjasama Organisasi Internasional, Keikutsertaan dalam Pertemuan Interkementerian dan Pertemuan Organisasi Internasional di Dalam dan Luar Negeri, Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-Isu Kerjasama Organisasi Internasional.

Perumusan Kertas/ Dokumen Posisi Kerjasama Organisasi Internasional meliputi Dokumen Posisi Kerjasama *World Health Assembly (WHA)*, *Technical Barrier Trade (TBT)-WTO*, *Sanitary and Phytosanitary (SPS) WTO*, *Member States Mechanism on Substandard/Spurious/Falsely Labeled/Falsified/ Counterfeit Medical Products (MSM on SSFFC)*, *The Indian Ocean Rim Association (IORA)*, dan *Codex*.

4. Pada kegiatan Operasional Biro Kerjasama Luar Negeri telah tersusun laporan monitoring pelaksanaan kegiatan triwulan. Dokumen yang ditargetkan untuk di disusun tahun 2017 adalah 4 laporan (laporan monitoring pelaksanaan kegiatan triwulan) dan telah terlaksana 100%.
5. Pada kegiatan Perencanaan Hubungan Kerjasama Luar Negeri telah tersusun dokumen RKAKL tahun 2017 yang memaparkan informasi tentang kegiatan yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Dokumen yang ditargetkan untuk disusun tahun 2017 adalah 1 dokumen dan telah terlaksana 100%.

6. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai di Biro Kerjasama Luar Negeri dilaksanakan sejalan dengan kegiatan perencanaan serta keberlanjutan dari reformasi birokrasi, Biro Kerjasama Luar Negeri mensinergikan program dan kegiatan peningkatan kinerja pegawai dalam membangun komitmen SDM Biro Kerjasama Luar Negeri dengan mewujudkan profesionalisme, produktivitas kerja yang baik secara kuantitas maupun kualitas. Kegiatan peningkatan kompetensi pegawai ditindaklanjuti dalam pemberian materi mengenai moralitas PNS serta pemberian pelatihan pembangunan manajemen SDM dalam mendorong motivasi kerja, meningkatkan etika dan disiplin, meningkatkan kemampuan bekerjasama dan koordinasi.

Jumlah pegawai Biro Kerjasama Luar Negeri Badan POM yang mengikuti kegiatan peningkatan kinerja sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, jumlah tersebut terdiri dari 16 (enam belas) orang ASN dan staf pramubakti yang berjumlah 8 (delapan) orang.

Target realisasi mencapai 100% dikarenakan SDM Biro Kerjasama Luar Negeri pada tahun 2017 sebanyak 24 orang. SDM yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi melakukan desiminasi kepada SDM lainnya untuk penularkan informasi kepada SDM lainnya. Sebagai tindak lanjut peningkatan kinerja Pegawai di Biro Kerjasama Luar Negeri akan dilaksanakan peningkatan pengawasan, pemberian reward, serta akan dievaluasi efektifitas peningkatan kinerja.

7. Review Dokumen dalam rangka peningkatan penerapan RB/QMS/SPIP di Biro Kerjasama Luar Negeri telah sesuai dengan target dengan tercapainya re-sertifikasi ISO Tahun 2017 (100%). Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), review SOP dan Instruksi Kerja serta sosialisasi ISO secara kontinyu dan sesuai jadwal dilaksanakan dalam rangka peningkatan berkelanjutan penerapan QMS di Biro Kerjasama Luar Negeri.
8. Kegiatan Workshop isu-isu kerjasama Regional mengangkat mengenai isu ASEAN dan kerjasama APEC. Penyelenggaraan workshop sebanyak 2 kali melibatkan narasumber antara lain dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan target kinerja adalah jumlah workshop yang diselenggarakan sebanyak 3 workshop dan sudah terlaksana 3 kali workshop dengan 3 dokumen pembahasan (Realisasi tercapai 100%).
9. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi rencana tindak lanjut kegiatan Biro Kerjasama Luar Negeri dan kegiatan.

10. Kegiatan pemenuhan alat pengolahan data Biro Kerjasama Luar Negeri berupa *personal computer* ditujukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan mengingat core bisnis di Biro Kerjasama Luar Negeri adalah penyusunan kajian, telaah, dokumen/kertas posisi dan perjanjian kerjasama luar negeri.

### ***EFISIENSI***

Efisiensi kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama, atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar, atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Dengan demikian, fokus perhatian dalam pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan.

Efisiensi suatu kegiatan dapat disimpulkan setelah membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE). Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % Capaian Output terhadap % Capaian Input sebagaimana rumus di bawah ini :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Angka ini bisa berupa *angka capaian efisiensi tahun lalu*, *angka capaian efisiensi instansi lain* untuk kegiatan yang sama, atau *angka capaian efisiensi sesuai dengan rencana capaian target*, dan sebagainya.

Dalam laporan ini SE yang digunakan adalah *angka capaian efisiensi* sesuai dengan rencana capaian/target yaitu 1, yang diperoleh dengan memakai rumus di bawah ini:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Output}} = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

IE kemudian dibandingkan dengan SE dan kategori penilaian diberikan dengan cara sebagai berikut :

Jika  $IE \geq SE$ , maka kegiatan dianggap efisien

Jika  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur Tingkat Efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Inefisiensi dapat menyebabkan pemborosan/kerugian negara, tetapi tidak selalu demikian. Ada juga inefisiensi yang tidak mengakibatkan terjadinya pemborosan/kerugian negara antara lain :

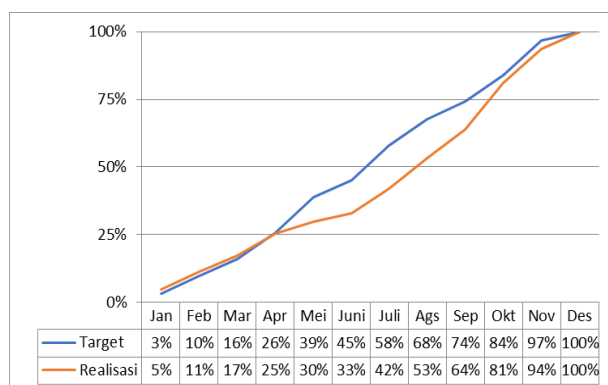
- Jika input kegiatan bukan dana, melainkan hanya SDM atau metode peralatan dan sebagainya.
- Realisasi input melebihi anggaran atau output lebih rendah dari targetnya akibat kenaikan harga yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

Pada tahun 2017, Biro Kerjasama Luar Negeri telah melaksanakan 22 kegiatan. Dari seluruh kegiatan telah berhasil mencapai tingkat efisiensi sampai 2,541. Hal ini menunjukkan hampir seluruh kegiatan yang ada telah efektif dan efisien pelaksanaannya karena perencanaan yang baik dan tata kelola keuangan yang proporsional. Sebagai gambaran berikut ini adalah kegiatan yang tingkat efisiensi cukup tinggi.

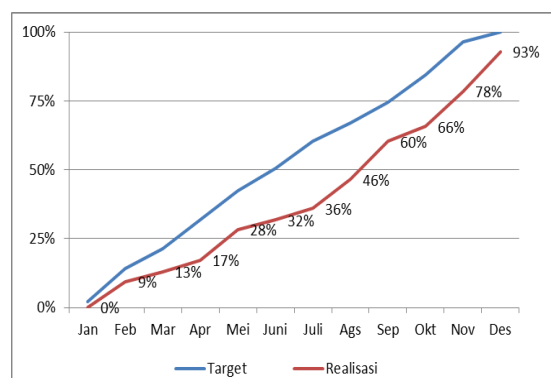
## B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi atau serapan anggaran Biro Kerjasama Luar Negeri pada tahun 2017 mencapai Rp. 4.917.869.245,- dari anggaran sebesar Rp.5.239.601.000 atau sebesar 93,86% Hal ini menunjukkan penurunan serapan anggaran dibandingkan serapan tahun 2016 yaitu 94,62%. Perbandingan Realisasi fisik dengan realisasi serapan anggaran tahun 2017 terlihat pada tabel dibawah ini:

Realisasi fisik



Realisasi serapan



Serapan anggaran belum optimal, hal ini terjadi disebabkan beberapa faktor yaitu:

Faktor Internal:

- a. Kurangnya kemampuan personil dalam membuat perencanaan, sehingga perencanaan yang belum baik;
- b. Kurangnya personil karena terdapat kegiatan yang bersamaan sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
- c. Kurangnya kemampuan personil dalam pengelolaan anggaran, dan banyaknya kegiatan yang menggunakan mekanisme uang persediaan sehingga kegiatan belum dapat dilakukan karena uang belum tersedia.

Faktor External:

- a. Banyaknya undangan atau kegiatan dari unit teknis atau antar kementerian yang bersamaan.
- b. Adanya pemotongan anggaran yang menyebabkan perubahan atau penundaan kegiatan yang memerlukan revisi anggaran.

# BAB IV. PENUTUP

## IV.1. Kesimpulan.

Biro Kerjasama Luar Negeri merupakan unit penunjang BPOM, yang dituntut untuk dapat meningkatkan hubungan dan kerjasama luar negeri Badan POM dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Badan POM dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Biro Kerjasama Luar Negeri juga dituntut untuk melakukan kajian-kajian terhadap potensi kerjasama luar negeri dengan negara-negara mitra maupun kerjasama dalam lingkup yang lebih besar seperti regional dan multilateral.

Sebagai upaya mendukung peningkatan hubungan dan kerjasama luar negeri tersebut Biro Kerjasama Luar Negeri melakukan penajakan hubungan bilateral dengan instansi terkait di negara mitra, penyusunan kertas posisi/dokumen posisi dan partisipasi dalam forum internasional, persiapan penyelenggaraan pertemuan internasional, koordinasi dengan instansi lintas sektor/ interkementerian sampai dengan fasilitasi perjalanan dinas luar negeri berupa pelayanan administrasi dokumen perizinan perjalanan dinas luar negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Kerjasama Luar Negeri berlandaskan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015-2019, maupun Rencana Strategis (Renstra) BPOM Tahun 2015-2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Kerjasama Luar Negeri Tahun 2016, menyajikan capaian kinerja Biro Kerjasama Luar Negeri Tahun 2016. Capaian kinerja tercermin dalam capaian indikator kinerja utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Hasil capaian kinerja secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan masih dalam kategori “Baik”. Meskipun demikian, pencapaian target indikator kinerja Biro Kerjasama Luar Negeri memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan kerjasama luar negeri sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif unit kerja teknis terkait.

Secara keseluruhan seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Biro Kerjasama Luar Negeri telah terlaksana dengan baik dan mencapai persentasi capaian kinerja yang baik. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian sasaran sehingga visi dan misi Badan POM dapat

diwujudkan melalui penyesuaian pencapaian sasaran yang ada dalam Renstra dengan QMS, peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, terpenuhinya sarana prasarana dan pemberdayaan SDM sehingga tercapai profesionalitas kerja secara dinamis.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Biro Kerjasama Luar Negeri bagi peningkatan kinerja dimasa datang antara lain adalah:

1. Menyusun sistem informasi hubungan dan kerjasama luar negeri Badan POM untuk membangun *instution knowledge* sehingga pejabat yang berkepentingan dapat memperoleh informasi data kerjasama yang komprehensif dan terkini. Hal ini penting dalam menyusun posisi kerjasama dan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan Badan POM khususnya dalam membangun kemitraan dan jejaring kerjasama dengan stakeholder terkait.
2. Meningkatkan pengelolaan *Human Capital Management* (HCM) di Biro KSLN dalam membuat perencanaan dengan melibatkan semua SDM yang ada
3. Meningkatkan implementasi Reformasi Birokrasi (RB), Quality Management System (QMS), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)  
Untuk meningkatkan implementasi RB, QMS dan SPIP diperlukan beberapa komponen seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kesadaran pegawai terhadap pelaksanaan ketiga hal tersebut. Antara lain meningkatkan komitmen dalam melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan dan meningkatkan kompetensi pengelolaan anggaran.

#### **IV.2. Saran**

1. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersediasserta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran.
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka perlu memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
3. Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi reward and punishment yang tegas dan ketat.

Akhir kata, kami berharap LAKIP 2017 Biro Kerjasama Luar Negeri dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para stakeholder, sekaligus dapat menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.

Lampiran 1

RENCANA STRATEGIS  
UNIT KERJA BIRO KERJASAMA LUAR NEGERI  
TAHUN 2015 – 2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					KETERANGAN
			2015	2016	2017	2018	2019	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Kerjasama	Meningkatkan Koordinasi Kerjasama dan Kemitraan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah pengembangan kerjasama dan/atau kerjasama internasional di bidang Obat dan Makanan	25	28	31	34	37	

Lampiran 2

RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II

Unit Organisasi Eselon II : Biro Kerjasama Luar Negeri

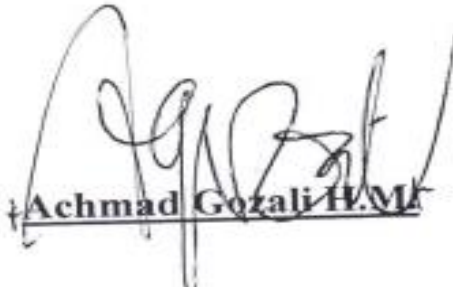
Tahun Anggaran : 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatkan Koordinasi Kerjasama dan Kemitraan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah pengembangan kerjasama dan/atau kerjasama internasional di bidang Obat dan Makanan	31

Jumlah Anggaran Kegiatan:

Jumlah pengembangan kerjasama dan/atau kerjasama internasional di bidang Obat dan Makanan : Rp 5.239.601.000

Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri



Achmad Gozali H.M.

Lampiran 3

PENETAPAN KINERJA  
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II

Unit Organisasi Eselon II : Biro Kerjasama Luar Negeri

Tahun Anggaran : 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatkan Koordinasi Kerjasama dan Kemitraan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah pengembangan kerjasama dan/atau kerjasama internasional di bidang Obat dan Makanan	31

Jumlah Anggaran:

Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri Badan POM : Rp 5.239.601.000

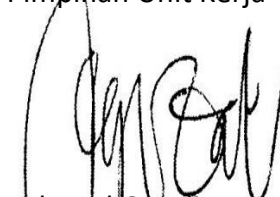
Jakarta, Januari 2017

Atasan Pimpinan Unit Kerja



Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si

Pimpinan Unit Kerja



Achmad Gozali H.M.

Lampiran 4

PENGUKURAN KINERJA  
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II

Unit Organisasi Eselon II : Biro Kerjasama Luar Negeri

Tahun Anggaran : 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatkan Koordinasi Kerjasama dan Kemitraan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah pengembangan kerjasama dan/atau kerjasama internasional di bidang Obat dan Makanan	31	31	100%

Jumlah Anggaran:

Kegiatan Pengembangan Kerjasama dan/ Kerjasama Internasional di bidang Pengawasan Obat dan Makanan Rp 5.239.601.000

Serapan Anggaran Kegiatan:

Kegiatan Pengembangan Kerjasama dan/Kerjasama Internasional di bidang Pengawasan Obat dan Makanan Rp 4.917.869.245

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN  
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II

Unit Organisasi Eselon II : Biro Kerjasama Luar Negeri

Tahun Anggaran : 2017

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya efektivitas kerjasama luar negeri Badan POM	Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri		Rp 5,239,601,000	Rp 4,917,869,245	93.86%
	Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri	007. Dokumen kerjasama internasional di bidang obat dan makanan [Base Line]	Rp 4,917,801,000	Rp 4,637,522,352	94.30%
1.	Penjajakan Kerjasama dengan Mitra di Luar Negeri	<u>Input:</u>			
		Dana	Rp 29,100,000	Rp 28,873,750	99.22%
		<u>Output:</u>	3 laporan	3 laporan	100.00%
		Terselenggaranya penjajakan kerjasama dengan mitra di luar negeri			
2.	Penyusunan Kajian Kerjasama Bilateral dan Multilateral	<u>Input:</u>			
		Dana	Rp 31,500,000	Rp 31,388,000	99.64%
		<u>Output:</u>	2 kajian	2 kajian	100.00%
		Tersusunnya kajian kerjasama Bilateral dan Multilateral			
3.	Penyusunan Posisi Badan POM dalam Kerjasama Bilateral	<u>Input:</u>			
		Dana	Rp 69,400,000	Rp 69,397,650	100.00%
		<u>Output:</u>	13 dokumen	13 dokumen	100.00%
		Jumlah dokumen posisi Badan POM dalam Kerjasama Bilateral			
4.	Keikutsertaan dalam Pertemuan Interkementerian dan Pertemuan Bilateral dengan Mitra di Dalam dan Luar Negeri	<u>Input:</u>			
		Dana	Rp 2,075,336,000	Rp 1,982,117,163	95.51%
		<u>Output:</u>	178 Trip	171 Trip	96%
		Jumlah sertifikasi ISO 9001			
5.	Pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular	<u>Input:</u>			
		Dana	Rp 6,800,000	Rp 6,774,750	99.63%
		<u>Output:</u>	2 laporan	1 laporan	50%
		Jumlah laporan pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular			
6.	Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-Isu Kerjasama Bilateral dan Multilateral	<u>Input:</u>			
		Dana	Rp 23,894,000	Rp 23,855,500	99.84%
		<u>Output:</u>	2 kegiatan	2 kegiatan	100.00%
		Jumlah workshop yang telah diselenggarakan			

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
7.	Penyusunan Posisi Badan POM dalam Kerjasama Regional	<u>Input:</u>			
		Dana	Rp 41,000,000	Rp 37,238,850	90.83%
		<u>Output:</u>	11 Laporan	11 Laporan	100%
		Jumlah kertas/dokumen posisi kerjasama regional			
8.	Penyusunan Kajian Kerjasama Regional	<u>Input:</u>			
		Dana	Rp 16,300,000	Rp 14,991,200	91.97%
		<u>Output:</u>	2 kajian	2 kajian	100%
		Jumlah kajian kerjasama regional			
9.	Keikutsertaan dalam Pertemuan Interkementerian dan Pertemuan Regional di Dalam dan Luar Negeri	<u>Input:</u>			
		Dana	Rp 475,195,000	Rp 469,786,170	98.86%
		<u>Output:</u>	156 Trip	157 Trip	100%
		Jumlah pertemuan yang dihadiri			
10.	Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-Isu Kerjasama Regional	<u>Input:</u>			
		Dana	Rp 103,680,000	Rp 90,610,500	87.39%
		<u>Output:</u>	3 kegiatan	3 kegiatan	100%
		Jumlah workshop yang telah diselenggarakan			
11.	Drug and Food Control Newsletter	<u>Input:</u>			
		Dana	Rp 166,680,000	Rp 130,427,542	78.25%
		<u>Output:</u>	3 Edisi	2 Edisi	67.00%
		Jumlah Drug and Food Control Newsletter yang diterbitkan			
12.	Penyusunan Kajian Kerjasama Organisasi Internasional	<u>Input:</u>			
		Dana	Rp 37,085,000	Rp 22,283,100	60.09%
		<u>Output:</u>	3 kajian	3 kajian	100.00%
		Jumlah kajian kerjasama organisasi internasional			
13.	Penyusunan Posisi Badan POM dalam Kerjasama Organisasi Internasional	<u>Input:</u>			
		Dana	Rp 51,000,000	Rp 50,742,200	99.49%
		<u>Output:</u>	7 dokumen	7 dokumen	100%
		Jumlah dokumen posisi kerjasama organisasi internasional			
14.	Keikutsertaan dalam Pertemuan Interkementerian dan Pertemuan Organisasi Internasional di Dalam dan Luar Negeri	<u>Input:</u>			
		Dana	Rp 707,295,000	Rp 620,723,049	87.76%
		<u>Output:</u>	100 Trip	93 Trip	93.00%
		Jumlah Pertemuan yang Dihadiri			
15.	Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-Isu Kerjasama Organisasi Internasional	<u>Input:</u>			
		Dana	Rp 127,350,000	Rp 119,538,700	93.87%
		<u>Output:</u>	3 kegiatan	3 kegiatan	100%
		Jumlah workshop yang telah diselenggarakan			
16.	Operasional Biro Kerjasama Luar Negeri	<u>Input:</u>			
		Dana	Rp 774,636,000	Rp 758,636,205	97.93%
		<u>Output:</u>	1 laporan	1 laporan	100.00%
		Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara			
17.	Perencanaan Hubungan Kerjasama Luar Negeri	<u>Input:</u>			
		Dana	Rp 20,150,000	Rp 19,061,680	94.60%
		<u>Output:</u>	1 laporan	1 laporan	100.00%
		Jumlah laporan hubungan kerjasama luar negeri yang telah dibuat			
18.	Peningkatan Kompetensi Pegawai Biro Kerjasama Luar Negeri	<u>Input:</u>			
		Dana	Rp 127,900,000	Rp 127,690,500	99.84%
		<u>Output:</u>	54 orang	54 orang	100.00%
		Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan			
19.	Penerapan RB/QMS/SPIP di Biro Kerjasama Luar Negeri	<u>Input:</u>			
		Dana	Rp 17,000,000	Rp 16,889,643	99.35%
		<u>Output:</u>	10 pembahasan	10 pembahasan	100%
		Terselenggaranya pembahasan terkait RB/QMS/SPIP			

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
20	Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri	<u>Input:</u>			
		Dana	Rp 16,500,000	Rp 16,496,200	99.98%
		<u>Output:</u>	2 laporan	2 laporan	100.00%
		Tersusunnya Laporan Tahunan dan LAKIP Biro KSLN tahun 2016			
	<b>996. Perangkat Pengolah Data [Base Line]</b>		<b>Rp 268,800,000</b>	<b>Rp 232,855,000</b>	<b>86.63%</b>
21	Pengembangan Sistem Kerjasama Luar Negeri	<u>Input:</u>			
		Dana	Rp 268,800,000	Rp 232,855,000	86.63%
		<u>Output:</u>	2 unit	2 unit	100.00%
		Jumlah alat pengolah data yang diadakan			
	<b>997. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran [Base Line]</b>		<b>Rp 53,000,000</b>	<b>Rp 47,491,893</b>	<b>89.61%</b>
22	Peralatan Perkantoran Biro Kerjasama Luar Negeri	<u>Input:</u>			
		Dana	Rp 53,000,000	Rp 47,491,893	89.61%
		<u>Output:</u>	8 unit	8 unit	100%
		Jumlah peralatan perkantoran yang diadakan			